

UPAH BURUH ONDERNEMING KARET DI ACEH TIMUR, 1907-1939

*Mawardi Umar**

ABSTRACT

This study aims at investigating the correlation between the wage level and the well being of the rubber plantation enterprise workers in East Aceh in the period of 1907 to 1939. It is of high significance in the historiography of Aceh because no studies on Aceh have been found that examine plantation enterprise workers. The major source of this study is the annual reports of the Labor Inspectorate from 1907 to 1939, the collection of National Library, Jakarta.

The results of the study indicate that the wage of the plantation enterprise workers in East Aceh was very low and worth only for subsistence and determined unilaterally by the enterprise. The workers contributed nothing to the wage determination. The wage level was adjusted to the living cost, especially the price of rice, and the financial condition of the enterprise. Therefore, the living standard of the rubber plantation workers in East Aceh never changed although their wage increased.

Key Words: upah, buruh, dan perkebunan karet

PENGANTAR

Perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan industri perkebunan karet di Sumatra Timur. Setelah tanah di Sumatra Timur mulai terbatas, upaya perluasan perkebunan karet mulai diarahkan ke daerah yang berdekatan dengan pusat-pusat perkebunan yang telah ada. Aceh Timur yang penduduknya jarang merupakan salah satu alternatif yang tepat karena daerah itu berbatasan langsung dengan Sumatra Timur. Hal ini ditunjang juga oleh kondisi keamanan wilayah dan prasarana ekonomi yang semakin baik sejak awal abad kedua puluh (Ismail, 1991:161).

Diawali dengan pembukaan perkebunan karet Pemerintah Hindia Belanda di Langsa tahun 1907, dalam waktu singkat Aceh Timur

telah menjadi daerah pengembangan tanaman karet Swasta Barat, sesuai dengan harapan Pemerintah (Langhout, 1923:90-91). Sampai tahun 1914, sudah terdapat perkebunan karet seluas 210.000 Ha di Aceh (Veer, 1969:273). Pesatnya perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur dapat juga dilihat dari kesaksian J.J. van de Velde saat dia pertama kali datang ke Aceh pada tahun 1928, dengan ungkapan "hingga Langsa kami melewati daerah yang mirip dengan Deli (Sumatra Timur), tempat banyak perkebunan karet" (Velde, 1987:83).

Sama halnya dengan di Sumatra Timur, persoalan tenaga kerja (buruh) merupakan masalah utama yang dihadapi perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh Timur sejak awal pembukaannya. Hal ini disebabkan oleh jaranginya penduduk lokal dan keengganan

* Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah, FKIP, Unsyiah, Banda Aceh

mereka bekerja pada perkebunan Barat. Untuk mengatasi kelangkaan buruh lokal ini mulailah didatangkan buruh migran terutama dari Jawa dengan perantara agen-agen (makelar) (Ismail, 1991:207). Buruh ini diikat dengan suatu kontrak berdasarkan *koelie ordonantie*, 1880, yang didalamnya termasuk *poenale sanctie*. Kebijakan dan peraturan perburuhan dan asisten perkebunan untuk Aceh secara keseluruhan berlaku sama Sumatra Timur dan Tapanuli (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, tahun 1515 no. 421, 1916 no. 46, 138, 334, dan 447, 1919 no. 776, 1920 no. 535, dan 1921 no. 39).

Pada tahun 1910, tahap pertama didatangkan buruh dari Jawa ke Aceh Timur berjumlah 858 orang. Jumlah ini meningkat tajam empat tahun kemudian, memasuki permulaan Perang Dunia I, jumlah buruh di Aceh Timur telah mencapai 7.869 orang (Ismail, 1991:207). Saat berakhirnya Perang Dunia I, (1917) jumlah buruh imigran yang bekerja di Aceh meningkat dua kali lipat lagi menjadi lebih dari 15.000 orang. Angka ini terus meningkat mendekati 30.000 orang satu dekade kemudian (1929) (lihat Tabel 1).

Berbeda dengan pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang lebih cenderung pada buruh bebas, perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh sebaliknya lebih cenderung mempekerjakan buruh kontrak walaupun telah keluar kebijakan penghapusan *Poenale Sanctie*. Namun demikian, perusahaan-perusahaan tersebut secara bertahap mulai mengalihkan penggunaan buruh kontrak ke buruh bebas. Pada tahun 1920-an, satu dari lima atau enam buruh adalah buruh bebas, tetapi pada tahun 1930-an masih satu dari empat atau lima buruh di Aceh adalah buruh kontrak. Rasio jenis kelamin di antara buruh di Aceh juga sangat jauh, tetapi semakin berimbang seiring semakin banyak buruh yang didatangkan oleh perusahaan perkebunan pada akhir 1920-an dan 1930-an. Pada dekade tersebut sudah terdapat tiga pria untuk satu wanita dalam komunitas buruh di daerah ini (Linblad, 1999:89).

Dari latar belakang di atas muncul satu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam kajian ini, yaitu "sejauh manakah pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan buruh perkebunan karet di Aceh Timur periode 1907-1939?" Permasalahan tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang lebih operasional berupa pertanyaan penelitian, yaitu bagaimanakah posisi bargaining buruh perkebunan karet di Aceh Timur dalam penentuan tingkat upah mereka, faktor apakah yang menjadi patokan penentuan tingkat upah buruh pada perkebunan karet di Aceh Timur, sejauh manakah kondisi keuangan perusahaan perkebunan berpengaruh terhadap tingkat upah buruh pada perkebunan karet di Aceh Timur, dan bagaimanakah pengaruh tingkat upah terhadap standard kehidupan buruh pada perkebunan karet di Aceh Timur?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah historiografi Aceh pada khususnya dan historiografi Indonesia secara umum. Sampai saat ini, masih terjadi ketimpangan yang sangat kontras dalam karya historiografi tentang Aceh. Tema-tema sosial politik, terutama perang dan konflik, jauh lebih diminati dibandingkan dengan tema sosial ekonomi. Sejak Snouck Hurgronje menyelesaikan karya pertamanya tahun 1928, penelitian ilmiah mengenai masyarakat Aceh, terutama dalam aspek sosial politik telah maju pesat. Sebaliknya, kajian sejarah ekonomi dan sosial ekonomi tidak mengalami perkembangan yang serupa. Masih sangat sedikit karya historiografi dalam kedua kelompok ini.

Kajian-kajian sejarah ekonomi Aceh yang ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori kajian, yaitu pertama, kajian-kajian yang menyoroti sejarah ekonomi Aceh secara global pada kurun waktu tertentu, yaitu: karya J. Langhout, R. Boersma, J.R.C. Gonggrijp, A.K. Das Gupta, Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud, M. Gade Ismail, dan S. Margana (Langhout, 1923:90-91; Boersma, 1923); Gonggrijp, 1944; Gupta, 1962; Hasan, 1978: 510-517; Mahmud, 1978:540-6; Ismail,

2002:269-293; Margana, 1997:44-80); kedua, kajian-kajian yang membahas kelompok pedagang, yaitu karya M. Syarif Isa, dan Zulfan (Isa, 1981:69-77; Zulfan, 1995); dan ketiga, karya yang mengkaji pengaruh ekonomi terhadap perubahan sosial suatu kelompok masyarakat (*uleebalang*) dalam suatu lokalitas tertentu (Aceh Timur), dan merupakan satu-satunya karya historiografi ekonomi tentang Aceh Timur, yaitu Disertasi Doktor M. Gade Ismail (Ismail, 2002:269-293). Dari semua kajian tersebut, belum ada satu pun yang mengkaji aspek buruh perkebunan secara khusus. Hanya karya M. Gade Ismail dan S. Margana yang menyinggung sedikit persoalan ini sebagai suatu variabel kecil dalam kaitannya dengan variabel ekonomi yang lebih besar.

Di wilayah lain, khususnya Sumatra Timur, karya historiografi buruh telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kajian mengenai buruh perkebunan telah menarik minat banyak ahli sejarah dan ahli ilmu sosial, baik dari dalam maupun luar negeri. Kajian buruh perkebunan di Sumatra Timur telah dilakukan dalam berbagai aspek.

Aspek pendapatan buruh perkebunan di Sumatra Timur dikaji oleh Sjafri Sairin (Sairin, 1991). Dengan membandingkan pendapatan yang diterima golongan kulit putih, dia melihat terjadi jurang yang sangat kontras. Golongan Eropa menerima gaji yang sangat tinggi dan fasilitas yang sangat bagus, sebaliknya kelompok buruh memperoleh gaji yang hanya cukup untuk hidup pas-pasan (*subsistence*) dan fasilitas yang sangat buruk. Aspek yang sama juga telah dilakukan oleh Langeveld (Langveld, "Arbeidstoestanden op de Ondernemingen ter Oostkust van Sumatra tussen 1920 en 1940 in het Licht van het verdwijnen van de poenale sanctie op de arbeidscontracten", dalam *Economischen Sociaal-Historisch Jaarboek 41*, hal. 294-368), terutama komposisi gaji buruh, perkembangan gaji dan perbaikan standar hidup buruh antara 1920-1940. Dia berkesimpulan bahwa pendapatan dan standar hidup buruh sangat berkaitan dan kebijakan kolonial sangat berpengaruh terhadap tingkat

gaji buruh. Dengan mengikuti Langveld, Ellen Leenarts (Leenarts, 1999). mencoba melihat hubungan pendapatan dengan kesejahteraan buruh perusahaan Barat di Luar Jawa secara keseluruhan.

Dari ketiga kajian mengenai pendapatan tersebut, tidak satu pun yang mengkaji pendapatan buruh perkebunan karet. Oleh karenanya, kajian mengenai upah buruh perkebunan karet di Aceh Timur ini, dengan menggunakan yang model yang digunakan Langveld dan Ellen Leenarts ini diharapkan dapat menutupi celah tersebut dalam historiografi buruh di Indonesia secara umum dan historiografi Aceh khususnya.

Kajian ini merupakan studi sejarah sosial ekonomi dari suatu komunitas perkebunan karet yang mempunyai ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan komunitas perkebunan-perkebunan lainnya. Penentuan Aceh Timur sebagai batasan spasial dalam penelitian ini didasarkan pada administrasi pemerintahan (Abdullah (ed.), 1988:13). Periode waktu 1907-1939 diambil lebih didasari pada alasan praktis dari pada alasan metodologis. Tahun 1907 merupakan tahun pertama dibukanya perkebunan karet oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Langsa, Aceh Timur, sedangkan tahun 1939 sebagai batas akhir karena data utama penelitian ini (data statistik dari Inspektorat Tenaga Kerja).

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian arsip dan perpustakaan. Sumber utama penelitian ini adalah delapan belas jilid laporan resmi dari kantor tenaga kerja, yaitu *Ver slag van de Arbeidinspectie*. Delapan belas jilid laporan ini, jilid 1 tahun 1911 sampai jilid 18 tahun 1939, sangat penting karena terdapat data statistik mengenai buruh perkebunan dalam berbagai aspek. Meskipun sebagian besar mengenai buruh di Aceh secara keseluruhan, sumber ini layak digunakan untuk menafsirkan keadaan buruh perkebunan karet di Aceh Timur dengan alasan bahwa sebagian sampai dengan akhir tahun 1930-an sebagian besar perkebunan yang beroperasi di Aceh berada di Aceh Timur dan sebagian besar darinya merupakan perkebunan karet.

Sumber lainnya adalah *Archief voor de Rubbercultuur in Nederlandsch-Indie, Statistiek van Aanplant, Produceerende Aanplant en Productie van de Groot-Cultuures (Rubber, Koffie, Klappers, Thee en Oilpalmen) van Sumatra's Oostkust, Atjeh en Tapanuli; Rubber en Koffie*, dan *Opgave omtrent Aanplant, Produceerenden Aanplant Oogst en Verschepping van Rubber en Koffie der Ondernemingen ter Oostkust van Sumatra, Tamiang en Oostkust van Atjeh*. Ketiga sumber ini penting untuk melihat perkembangan perkebunan karet itu sendiri. Selanjutnya, sumber yang dianggap penting adalah sumber resmi pemerintah, yaitu *Staatblad van Nederlandsch-Indie, Koloniaal Verslag, Memorie van Overgave* Asisten Residen Aceh Timur, dan *Tijdschrief van de Binnenland Bestuur*. Seterusnya, dipakai juga majalah dan surat kabar, yaitu majalah *De Planter, De Indische Gid*, dan *Prisma*; dan Surat Kabar *Pewarta Deli* terbitan Medan.

Penelusuran sumber terutama dipusatkan di Jakarta, yaitu di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan LIPI. Selain itu, beberapa sumber diperoleh dari koleksi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Perpustakaan Yayasan Prof. Ali Hasjmy, Perpustakaan Daerah NAD, Pemerintah Daerah Tk II Aceh Timur, koleksi pribadi Dr. M. Gade Ismail, MA. (Alm.), dan koleksi di beberapa perpustakaan di Yogyakarta. Karena fenomena yang dieksplorasi adalah fenomena historis, sumber-sumber tersebut diproses dalam bingkai metode sejarah. Mulai dari proses pengumpulan bahan sampai ke tahap penulisan akhir dilakukan dengan mengacu pada metode sejarah (Garraghan, 1957; Kartodirdjo, 1992).

UPAH BURUH

Menurut Langveld, upah dan biaya hidup buruh sangat erat kaitannya dan kebijakan kolonial mempunyai implikasi yang sangat kuat terhadap tingkat upah buruh. Kebijakan upah perusahaan-perusahaan Barat di luar Jawa

periode 1920-an dan 1930-an tergantung pada biaya hidup, kemakmuran umum, dan intervensi dari Inspektorat tenaga Kerja (Leenarts, 1999:131).

Upah para buruh perkebunan dibayar setiap 14 hari sekali yang disebut "hari besar" pada tanggal satu dan lima belas atau tujuh belas tiap bulan, dan setelah itu libur satu hari untuk istirahat. Pada hari pembayaran, upah buruh duduk berbaris di depan rumah Asisten Bagian Satu. Mereka dipanggil satu per satu untuk mengambil upahnya dan tidak boleh protes mengenai jumlah yang mereka terima. Pada pembayaran akhir bulan selalu diadakan acara hiburan. Selain pertunjukan wayang kulit juga diadakan pesta judi. Selain itu, pada malam itu banyak buruh yang menghabiskan uang mereka untuk main perempuan. Jadi, tidak mengherankan pada umumnya buruh tidak dapat menyimpan uang mereka.

Penentuan besarnya jumlah upah buruh perkebunan di Sumatra Timur pada mulanya adalah atas dasar kesepakatan antara perusahaan perkebunan dan individu buruh. Ini tercermin dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dengan para buruh. Sebelum berdirinya persekutuan perusahaan perkebunan Sumatra Timur, *Algemeene Vereeniging van Rubbersplanter ter Oostkust van Sumatra* (AVROS), perjanjian kerja ditandatangani langsung oleh masing-masing perusahaan perkebunan dengan para buruh. Setelah organisasi tersebut berdiri, pihak perusahaan perkebunan anggota AVROS diwakili oleh AVROS. Buruh secara individu menandatangani perjanjian kerja dengan AVROS, yang diwakili oleh agen-agen mereka, di daerah asal para buruh. Kerap terjadi, buruh tidak mengerti dan memahami isi perjanjian itu karena tingkat pendidikan mereka yang rendah (Sairin, 1991:31). Dalam hal kebijakan upah, semua perusahaan perkebunan di Aceh (walaupun tidak termasuk dalam anggota AVROS) tetap mengikuti aturan dan kebijakan yang diambil oleh AVROS (Leenarts, 1999:149).

Dari data yang diperoleh dari laporan Inspektorat Tenaga Kerja, sampai dengan tahun 1919, masih terdapat perbedaan upah buruh kontrak yang bekerja di Aceh berdasarkan suku dan kebangsaan. Akan tetapi, setelah tahun 1919 tidak didapati lagi perbedaan tersebut, namun telah terjadinya keseragaman dengan mengikuti ketentuan AVROS, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2 dan Tabel 3.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa upah buruh kontrak tertinggi adalah buruh Cina dan buruh Dayak dengan rata-rata 50 sen per hari; diikuti buruh Padang 40 sen, buruh Keling 38,67 sen, dan buruh Nias 37 sen per hari; sedangkan upah yang paling rendah adalah buruh Jawa dengan rata-rata buruh laki-laki kontrak pertama 33,4 sen dan perpanjangan kontrak 39 sen per hari, dan buruh perempuan kontrak pertama rata-rata 28,4 sen dan perpanjangan kontrak 32 sen per hari. Upah perpanjangan kontrak buruh Cina, Padang, Dayak, Keling, dan Nias lebih tinggi 5 sen dari buruh kontrak pertama. Sangat disayangkan bahwa data upah buruh Dayak dan buruh Padang hanya ada untuk tahun 1912 saja.

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata upah minimum harian buruh laki-laki kontrak pertama adalah 40,3 sen, sedangkan buruh perempuan 35,3 sen; upah minimum harian buruh laki-laki perpanjangan kontrak rata-rata 44,1 sen, sedangkan buruh perempuan 39,1 sen. Data ini menunjukkan bahwa antara buruh laki-laki dan buruh perempuan, baik buruh kontrak maupun buruh bebas, terdapat perbedaan margin upah minimum harian sekitar 4 sen. Upah minimum tertinggi buruh *onderneming* karet di Aceh Timur terjadi pada periode Nopember 1920-April 1921. Tingginya upah ini tidak terlepas dari kondisi harga karet yang mengalami kenaikan cukup berarti pada periode ini. Sedangkan upah minimum mengalami penurunan yang cukup signifikan (hampir setengah upah tertinggi) mulai awal tahun 1930-an akibat resesi ekonomi. Dari Tabel 3 juga dapat dilihat bahwa upah minimum antara

kontrak pertama dengan buruh perpanjangan kontrak pada *onderneming* karet di Aceh Timur terjadi perbedaan sebesar 5 sen.

KESEJAHTERAAN BURUH

Tingkat upah ini tidak dapat dijadikan ukuran kesejahteraan buruh tanpa dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok saat itu, terutama beras. Sebagai daerah yang kurang cocok untuk pertanian padi, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, kebutuhan beras Aceh Timur harus dipasok dari luar daerah. Ditambah lagi, pesatnya perkembangan *onderneming* membuat daerah ini menjadi pengimpor beras terbesar di Aceh. Rata-rata impor beras Aceh Timur tiap tahun antara tahun 1913-1919 adalah 4.533,86 ton, atau 43,15 % dari impor beras Aceh secara keseluruhan.

Tingginya kebutuhan beras Aceh Timur sangat berkaitan dengan jumlah buruh perkebunan karet di daerah ini yang cukup besar. Sampai dengan tahun 1917, kebutuhan besar Aceh Timur terjadi peningkatan yang cukup signifikan, tetapi setelah itu kebutuhan terjadi penurunan yang cukup berarti. Kecendrungan ini juga terjadi pada wilayah Aceh secara keseluruhan. Penurunan kebutuhan beras Aceh Timur ini terjadi sebagai dampak dari keberhasilan program ekstensifikasi dan intensifikasi tanaman padi dari pemerintah di daerah ini dalam upaya mengantisipasi ter-ulangnya kelaparan buruh perkebunan karet dan juga penduduk pribumi pada masa Perang Dunia I (Ismail, 2002:181). (lihat Tabel 4, 5, dan 6).

Tingkat kesejahteraan buruh perkebunan karet di Aceh Timur tidak dapat dipisahkan dari harga beras di daerah ini yang dipasok dari daerah lain di Aceh. Perkembangan harga beras di perkebunan karet tidak otomatis mengikuti perkembangan harga beras di pasar bebas. Berbeda dengan harga beras di pasar bebas yang terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun sesuai dengan hukum pasar, harga beras di perkebunan karet justru cenderung konstan walaupun terjadi fluktuasi terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama. Harga beras tertinggi, baik di pasar bebas maupun di perkebunan

karet terjadi pada periode akhir 1920 dan awal 1921, sedangkan harga terendah terjadi pada periode tahun 1930-an. Bila dihubungkan dengan tingkat upah minimum kuli dalam Tabel 4.2 di belakang, data ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang erat antara harga beras dengan tingkat upah kuli. Meskipun demikian, pada kenyataannya naiknya harga beras dan kebutuhan hidup lainnya tidak secara otomatis membuat pengusaha perkebunan menaikkan upah buruh. Sering terjadi, naiknya upah buruh terjadi setelah adanya usulan dari Inspektorat Tenaga Kerja, berdasarkan hasil inspeksi di lapangan.

Meskipun tidak semua usulan mereka diikuti oleh pengusaha perkebunan, usulan-usulan mereka telah cukup efektif dalam menekan pengusaha perkebunan untuk memperbaiki upah buruh sesuai dengan kebutuhan hidup. Berdasarkan bukti yang ada, tekanan-tekanan mereka ternyata berpengaruh besar pada perusahaan perkebunan dalam menentukan tingkat upah buruh. Usulan menaikkan upah sering dituruti oleh pengusaha perkebunan baik melalui menaikkan gaji atau pemberian tunjangan walaupun tidak sebesar yang diusulkan Inspektorat. Begitu juga saat terjadinya penurunan harga karet akibat krisis ekonomi, pengusaha perkebunan harus meminta persetujuan dari Inspektorat Tenaga Kerja terlebih dahulu untuk menurunkan upah buruhnya (lihat tabel 7).

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa kehidupan buruh di perkebunan-perkebunan di daerah terpencil ternyata lebih sulit dari perkebunan-perkebunan yang dekat dengan kota-kota besar. Hal ini dikarenakan oleh biaya hidup di daerah terpencil yang lebih tinggi akibat mahalnya biaya transportasi barang-barang kebutuhan pokok. Karena banyak perkebunan karet di Aceh Timur terletak di daerah terpencil, dapat ditafsirkan bahwa kehidupan buruhnya juga banyak yang sangat sulit.

Untuk melihat gambaran hidup seorang buruh di perkebunan pada awal tahun 1937,

sebagai ilustrasi, dapat dilihat dalam tulisan yang sangat menarik dari surat kabar terbitan Medan, "Sinar Deli" (Sairin, 1991:29-30), tanggal 2 Maret 1937. Digambarkan bahwa upah buruh perkebunan hanya 35 sen sehari. Apabila seorang buruh mampu bekerja 28 hari sebulan, dia akan menerima upah sekitar f 9,80 sebulan. Setelah membayar uang panjar (*voorschoot*) dan biaya hidupnya selama sebulan, upahnya yang masih tinggal dalam genggamannya hanya sekitar f 2,40. Namun, para buruh umumnya jarang sekali dapat menyimpan sisa upahnya itu karena uang itu digunakannya kemudian untuk iuran pertunjukan, wayang kulit, berjudi dan bersenang-senang pada hari gajian besar yang diadakan sebulan sekali.

Perkembangan tingkat pendapatan buruh perkebunan karet di Aceh Timur yang sangat tergantung dengan kondisi finansial perusahaan juga berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka. Saat kondisi perkebunan karet membaik, kondisi kesehatan buruhnya dan anak-anak mereka juga ikut membaik, seperti pada periode awal tahun 1920-an. Begitu juga sebaliknya, saat kondisi perkebunan memburuk akibat diterpa depresi ekonomi pada awal sampai pertengahan 1930-an, kondisi kesehatan mereka juga ikut memburuk. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada aspek pendidikan anak buruh. Tingkat partisipasi sekolah anak buruh perkebunan karet di Aceh Timur rata-rata hanya 31,3 %. Selain karena rendahnya pendapatan, rendahnya tingkat partisipasi ini dapat ditafsirkan disebabkan oleh sedikitnya jumlah sekolah dan terisolasinya mereka dari penduduk asli. Tingkat pendapatan buruh yang sangat rendah menyebabkan mereka sangat berat untuk dapat memenuhi biaya untuk keperluan sekolah anak-anak mereka. Oleh karena itu, para buruh tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi dari sistem pendidikan ini. Dalam bayangan mereka, pada akhirnya anak-anak mereka juga akan menjadi buruh perkebunan menggantikan posisi mereka.

SIMPULAN

Sebagai buruh kontrak dalam sistem perkebunan kapitalis pada masa kolonial, posisi *bargaining* buruh perkebunan karet di Aceh Timur dalam penentuan upah kerja sangat lemah. Buruh malahan tidak punya peran apa-apa terhadap kebijakan upah. Apabila buruh sudah menandatangani kontrak, berapa pun upah dan bagaimanapun kondisi kerja di perkebunan harus mereka terima. Apabila menolak, buruh tersebut dianggap melanggar kontrak kerja dan dapat dihukum. Lembaga yang terbukti berperan menekan perkebunan untuk menyesuaikan upah buruh dengan kebutuhan riil di lapangan walaupun tidak seluruhnya diikuti adalah Inspektorat Tenaga Kerja.

Upah kerja buruh perkebunan karet di Aceh Timur sangat tergantung pada kondisi finansial perusahaan yang selalu berfluktuasi menurut harga karet di pasaran dunia. Upah juga disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, terutama beras. Saat harga beras naik upah tidak secara otomatis naik, tetapi disesuaikan dengan kondisi finansial perusahaan. Sebaliknya, apabila harga karet di pasaran dunia turun, walaupun harga beras tetap tinggi, upah buruh secara otomatis akan ikut turun. Dengan demikian, kesejahteraan buruh perkebunan karet di Aceh Timur tidak pernah berubah meskipun upah naik.

Sebagai buruh pada perkebunan yang berorientasi ekspor, kondisi kesejahteraan buruh perkebunan di Aceh Timur mengalami degradasi yang sangat parah terjadi pada dekade awal tahun 1930-an, saat terjadinya depresi ekonomi. Meskipun harga beras juga ikut turun, namun turunnya upah yang sangat besar telah menyebabkan beban hidup buruh sangat berat. Hal ini telah berdampak pada menurunnya kondisi kesehatan buruh dan keluarganya dan pendidikan bagi anak-anak mereka.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, Taufik (ed.). 1988. *Sejarah Lokal di Indonesia* (edisi ke 2). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Boersma, R. 1923. *Atjeh als Land voor Handel en Bedrijf*. Utrecht: Boekhandel Cohen.
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. East Fordham Road, New York: Fordham University Press.
- Gonggrijp, J.R.C.. 1944. *Overzicht van de Economische Ontwikkeling van Atjeh Sedert de Pacificatie (tijdperk 1923-1938)*. Den Haag: W.P. van Sockum & Zoon.
- Gupta, A.K. Das. 1962. "Aceh and Indonesian Trade and Politic 1600-1641". *Disertasi Doktor*, Cornell University, Ithaca.
- Hasan, Ibrahim. 1978. "Masalah Ekonomi dan Perdagangan di Kerajaan Aceh Darussalam", dalam: *Sinar Darussalam*, 96/97, Banda Aceh, hal 510-517.
- Houben, Vincent J. H. dkk. 1999. *Coolie Labour in Colonial Indonesia; A Study of Labour Relations in the Outer Islands, c. 1900-1940*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Isa, M. Syarief. 1981. "Perkembangan Historis Penguasa di Daerah Aceh; Suatu Tinjauan", dalam *Sinar Darussalam*, 104/105, Banda Aceh, hal. 69-77.
- Ismail, M. Gade. 1991. "Seuneubuk Lada, Uleebalang, dan Kumpeni Perkembangan sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840- 1942", *Disertasi Doktor*, Universitas Leiden.
- . 2002. "Ekonomi Dualistis Aceh Selama Periode Kolonial Akhir", dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: PSSAT UGM.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Langeveld, H. J. 1978. "Arbeidstoestanden op de Ondernemingen ter Oostkust van Sumatra tussen 1920 en 1940 in het Licht van het verdwijnen van de poenale sanctie op de arbeidscontracten", dalam: *Economischen Sociaal-Historisch Jaarboek 41*, hal. 294-368.
- Leenarts, Ellen. 1999. "Coolie Wages in Western Enterprises in the Outer Island, 1919-1938," dalam: Vincent J. H. Houben, et al., *Coolie Labour in Colonial Indonesia; A Study of Labour Relations in the Outer Islands, c. 1900-1940*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Linblad, J. Thomas. 1999. "New Destinations; Conditions of Coolie Labour Outside East Sumatra, 1910-1938", dalam: Vincent J. H. Houben et al., *Coolie Labour in Colonial Indonesia; A Study of Labour Relations in the Outer Islands, c. 1900-1940*. Wiesbaden :Harrassowitz Verlag.
- Mahmud, Syamsuddin. 1978. "Sejarah Ekonomi dan Keuangan dalam Kerajaan Aceh Darussalam", dalam *Sinar Darussalam*, 96/97, Banda Aceh, hal. 540-546.
- Margana, S. 1997. "Perdagangan dan Perkembangan Ekonomi Aceh, 1900 - 1940", dalam *Lembaran Sejarah Vol. I, No. 1*, 1997, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, hal. 44-80.

- Sairin, Sjafrî. 1991. "Tingkat Upah Buruh Perkebunan di Sumatra Utara" dalam *Prisma* No. XX, April 1991.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, tahun 1515 no. 421, 1916 no. 46, 138, 334, dan 447, 1919 no. 776, 1920 no. 535, dan 1921 no. 39.
- Veer, Paul van't. 1969. *Perang Belanda di Atjeh* (terj. Aboebakar), Banda Aceh: Dinas P & K Daerah Istimewa Aceh 1969.
- Velde, J. J. Van de. 1987, *Surat Surat dari Sumatera 1928 – 1949* (terj. Pustaka Ajeta). Jakarta: Grafiti Press.
- Zulfan. 1995. "Kelompok Pengusaha Pada Masa Kemerdekaan di Aceh, 1945 – 1949". Tesis S-2, Universitas Indonesia, Jakarta.

LAMPIRAN

Tabel 1. Jumlah Kuli di Aceh, 1910-1938

Thn	Kuli Kontrak				Kuli Bebas				Jml
	Lk	Pr	Jml	%	Lk	Pr	Jml	%	
1910	-	-	1280	49	-	-	1337	51	2617
1911	-	-	3325	71	-	-	1335	29	4660
1912	3514	1942	5456	75	-	-	1799	25	7255
1913	-	-	-	-	-	-	-	-	7852
1914	-	-	4647	59	-	-	3222	41	7869
1915	-	-	-	-	-	-	-	-	7409
1916	-	-	-	-	-	-	-	-	8036
1917	8801	4359	13160	90	1375	46	1421	10	14581
1918	10553	5208	15761	92	1218	74	1292	8	17053
1919	12503	5469	17972	88	-	-	2435	12	20407
1920	13300	5559	18559	98	-	-	300	2	18859
1921	7731	1844	9575	59	-	-	6692	41	16267
1922	11644	1179	12823	90	-	-	1418	10	14241
1923	-	-	7756	85	-	-	1390	15	9146
1924	-	-	8613	78	-	-	2461	22	11074
1925	6291	1670	7961	78	1841	441	2282	22	10243
1926	10158	3778	13936	85	1961	439	2400	15	16336
1927	12553	5146	17696	85	2616	506	3122	15	20818
1928	-	-	22959	85	-	-	3951	15	26910
1929	18307	7019	25326	84	3901	713	4614	16	29940
1930	13189	7856	21045	81	4021	776	4797	19	25842
1931	6746	6294	13040	66	6193	545	6738	34	19778
1932	2010	3401	5411	37	8321	1086	9407	63	14820
1933	3310	437	3747	28	8056	1599	9655	72	13402
1934	2996	208	3204	21	10140	1729	11869	79	15073
1935	2806	62	2868	20	9745	2027	11772	80	14640
1936	2484	301	2785	18	10499	2538	13037	82	15822
1937	3970	921	4891	23	13333	3172	16505	77	21396
1938	3556	1211	4767	21	12769	4663	17432	79	22199

Sumber: Verslag Arbeidsinspectie 1910-1938; Lihat juga J. Thomas Lindblad, (1999), hal. 104.

Tabel 2: Upah Harian Buruh Onderneming di Aceh menurut Suku dan Kebangsaan, 1912-1919 (dalam sen)

Thn	Jawa Kontrak I		Jawa Perpanjangan		Cina	Keling	Nias	Padang	Dayak
	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.					
1912	33	28	40	30	50	-	35	40	50
1916	33	28	40	30	50	-	35	-	-
1917	33	28	35	30	50	38	35	-	-
1918	33	28	40	35	50	40	40	-	-
1919	35	30	40	35	50	38	40	-	-

Sumber: Verslag van Arbeidsinspectie, 1912-1919.

Tabel 3: Upah Minimum Harian Buruh Perkebunan Karet Kelompok AVROS, 1919-1938 (dalam sen)

Tahun	Kontrak Pertama		Perpanjangan	
	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.
Jan. 1919-Jan. 1920	35	30	40	35
Feb. 1920-Okt. 1920	41	36	46	41
Nov. 1920-Apr. 1921	55	50	60	55
Mei 1921-Okt. 1922	47	42	52	47
Sept. 1922-Jan. 1926	42	37	47	42
Feb. 1926-Agust. 1931	45	40	50	45
Sept. 1931-Des. 1932	37	32	37	32
Jan. 1933-Agust. 1933	32	27	37	32
Sept. 1933-Feb. 1935	37	32	37	32
Mar. 1935-Des. 1938	32	27	35	30

Sumber: *Verslag van Arbeidsinspectie 1911-1938*.
Lihat juga Ellen Lennarts : (1999), hal. 153

Tabel 4: Harga Beras Pada Onderneming Karet di Sumatra Timur dan Aceh, 1919-1938.

No	Periode	Harga (sen/kg)
1.	Tahun 1912 - Oktober 1920	10,00
2.	Nopember 1920 – April 1921	20,00
3.	Mei 1921 – Agustus 1931	12,50
4.	September 1931 – Desember 1938	7,50

Sumber: *Verslag van Arbeidsinspectie 1912 -1938*.
Lihat juga Ellen Lennarts, (1999), hal. 152.

Tabel 5 : Harga Beras di Kota-kota Besar di Pulau Jawa dan Sumatra 1919-1938.

Tahun	Harga (Sen/kg)	Tahun	Harga (Sen/kg)
1919	15,6	1929	16,4
1920	25,3	1930	16,1
1921	21,3	1931	10,3
1922	15,6	1932	8,4
1923	14,6	1933	6,6
1924	16,3	1934	6,4
1925	16,1	1935	6,4
1926	17,0	1936	5,9
1927	15,5	1937	6,9
1928	15,4	1938	7,0

Sumber : Ellen Lennarts, (1999), hal. 152.

Tabel 6: Impor Beras ke Aceh dan Aceh Timur, 1913-1919 (dalam ton)

Tahun	Aceh	Aceh Timur	Persentase Aceh Timur
1913	12.370	4.948	40,00
1914	10.679	4.277	40,05
1915	7.390	3.503	47,40
1916	13.510	5.919	43,81
1917	15.391	6.710	43,59
1918	10.100	4.404	43,60
1919	4.532	1.976	43,60

Sumber : M. Gade Ismail, 1991, Lampiran 8, hal. 258. Lihat Juga J. Kreemer, "De Rijscultuur in het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden", TKNAG 35 (1918) II, hal. 396.

Tabel 7: Inspeksi Budget Kuli untuk Pantai Timur Sumatra dan Aceh, 1923-1934.

Tahun	Upah Minimum Perhari yang Cukup Menurut Inspektorat Tenaga Kerja (berdasarkan hasil inspeksi di lapangan)	Tanggapan dari Organisasi Perusahaan Perkebunan
1923	-42 Sen tidak cukup. -Di wilayah terpencil biaya hidup sangat tinggi	Desember 1923; DPV dan AVROS tidak setuju upah tidak cukup, tetapi berjanji akan menaikkan upah di daerah terpencil sebagai tunjangan
Agust. 1925	-42 Sen tidak cukup, -47 Sen baru cukup	Desember 1925: Upah minimum dinaikkan sebagai tunjangan 3-4 sen perhari pada perkebunan Karet.
Okt. 1926	-38-39 sen cukup untuk laki-laki. -32-33 sen cukup untuk perempuan. -Di wilayah terpencil tidak cukup.	42 sen gaji harian cukup. DPV dan AVROS menyarankan anggotanya meminisir biaya hidup dengan mengurangi biaya traspor dan sewa bagi kedai milik perkebunan.
Sept. 1931	-	Menurunkan upah dengan persetujuan Inspektorat Tenaga Kerja
Akhir 1932	-28 sen untuk laki-laki -32 sen untuk wanita	AVROS menurunkan gaji menjadi 32 sen untuk laki-laki dan 27 sen untuk perempuan
Akhir 1934	-24,5 sen untuk laki-laki dan 20 sen untuk wanita (termasuk 15% kebutuhan khusus)	Maret 1935 ; AVROS menurunkan upah sebesar 2 sen
Pertengahan 1937	-28,5 sen untuk laki-laki dan 23,7 untuk wanita.	

Sumber: Ellen Lennarts, (1999), hal. 154-5. Lihat juga Verslag van Arbeidsinspectie 1923-1937